



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 PROVINSI SULAWESI UTARA**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI, PENGESAHAN ALAT
BUKTI TAMBAHAN**

JAKARTA

RABU, 24 JULI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Utara

PEMOHON

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Perkara Nomor 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Amanat Nasional (Perkara Nomor 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Pengesahan Alat Bukti Tambahan

**Rabu, 24 Juli 2019, Pukul 15.56 - 17.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Abdul Ghoffar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Dipranto Tobok Pakpahan
2. Phillian Sinaga

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Herman Kadir
2. Eva Yulianti
3. Andi Muh. Yusuf
4. RA. Shanti Dewi

C. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Totok Prasetyanto

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Michael R. Dotulong
2. Rahmat Taufit
3. Jellij F. B. Dondokambey
4. Denny Kaunang
5. Totok Prasetyanto

E. Saksi Termohon Perkara Nomor 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Ardilles M. R. Mewoh (Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara)
2. Lanny A. Ointu (Ketua Div. Perencanaan dan Data)
3. Carles Yohanes W (Sekretariat KPU Minahasa Utara)

F. Saksi Termohon Perkara Nomor 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Sunday Daud A. Rompas
2. Eko Rizki Zakaria
3. Basyarudin Kiyai Demak

G. Saksi Pihak Terkait Perkara Nomor 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Djonij Kasuehuna

H. Saksi Pihak Terkait Perkara Nomor 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Moktar Arunde Prapaga

I. Kuasa Hukum Termohon:

1. Asep Andryanto
2. Febi Hari Oktavianto
3. Imam Munandar
4. Yuni Iswantoro

J. Bawaslu:

1. Mustarin Humagi (Bawaslu Sulawesi Utara)
2. Supriyadi Pangellu (Bawaslu Sulawesi Utara)
3. Yenne Janis
4. Marwan Kawinda (Bawaslu Kota Manado)
5. Rocky Marciano Ambar

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.56 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang saya buka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera, om swatiastu. Kita akan melanjutkan persidangan untuk mendengarkan keterangan saksi atau ahli, kalau ada, tampaknya tidak ada dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Masing-masing 3 orang yang sudah di ... sebagaimana sudah ditentukan dan diberitahukan oleh Mahkamah. Pemohon Nomor 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 hadir?

2. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Hadir, Yang Mulia. Oh Termohon, maaf.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pemohon, Pemohon Nomor 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari PDI Perjuangan, hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pemohon Nomor 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Amanat Nasional hadir? Baik. Kemudian Termohon 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

6. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kemudian Termohon 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

8. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Pihak Terkait dari Pemohon 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Hadir. Pihak Terkait dari Pemohon 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R. DOTULONG

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R. DOTULONG

121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ada dua, Yang Mulia.

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, pokoknya sudah dua-duanya kompak hadir, gitu kan?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MICHAEL R. DOTULONG

Hadir, Yang Mulia, dari Nasdem.

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, dari Nasdem dan yang satu lagi?

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENNY KAUNANG

PDI Perjuangan.

17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dari PDI Perjuangan. Enggak ada saling ini? Oh, siapa? Oh, tadi, tadi, anu ... di sini? Yang lawyer dari PDI Perjuangan? Ndak, bukan lain, Pak. Ya, siapa saksi dari Perkara Nomor 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 3 orang siapa? Ya, kemudian Saksi dari 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 3 orang? Ya, tiga orang, Pak.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDI MUH. YUSUF

Dua, Pak. Dari DPR-RI dan DPRD Minahasa Utara I.

19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pokoknya 3 orang. Sudah diberitahukan sejak awal, kami memperlakukan sama untuk semua Pemohon. Tiga orang, silakan Saudara pilih siapa Saksi yang akan dihadirkan? Siapa? Silakan dipilih sesuai dengan ... korelasinya dengan permohonan yang akan dipilih untuk ini. Baik, silakan!

20. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Saksinya Termohon untuk Perkara 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, kami menghadirkan 3, Yang Mulia. Yang satu masih sebagai Ketua KPU Kota Manado (...)

21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang mana orangnya?

22. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Beliau (...)

23. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, kalau be ... sekarang memberikan kesaksian?

24. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Memberikan keterangan, Yang Mulia.

25. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Di ... di sini ditempat Saksi, cuma nanti tidak perlu disumpah
Karena masih terikat sama sumpah jabatan.

26. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Ya, Yang Mulia.

27. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Silakan! Kemudian?

28. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Terus yang kedua, anggota PPK dan juga ketua KPPS itu vicon,
Yang Mulia.

29. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Masih menjabat yang itu?

30. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Ndak.

31. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tidak? Berarti harus diambil sumpahnya.

32. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Ya, dua yang diambil sumpah, Yang Mulia.

33. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu saja?

34. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Ya.

35. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dari 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

36. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO

Baik, Yang Mulia. Untuk perkara 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang akan memberikan keterangan, yang pertama Ketua KPU Sulawesi Utara, Bapak Ardilles (...)

37. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ada disini?

38. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRIYANTO

Ada, Yang Mulia.

39. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Di sana di tempat Saksi, Pak.

40. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRIYANTO

Baik. Yang kemudian, yang kedua, Ibu Lanny A Ointu dari KPU Sulawesi Utara, silakan Ibu?

41. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, silakan kesana! Masih menjabat, ya? Dua-duanya, ya?

42. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRIYANTO

Masih, Yang Mulia.

43. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Berarti tidak perlu kami sumpah lagi, ya.

44. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRIYANTO

Kemudian yang ketiga, Bapak Carles Yohanes dari KPU Kabupaten Minahasa Utara. Silakan, Pak Carles?

45. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Mohon maaf ini karena ruangnya RSS ya, Ruangan Super Sempit, jadi agak kesulitan memang untuk ini. Ya, silakan! Dari Pihak Terkait masing-masing 1 orang sudah, ya? Bapak yang di belakang ya,

yang Pihak Terkait, ya? Baik, ya. Masing-masing Saksi, untuk semua Saksi mohon hadir ke depan dulu untuk diambil sumpah. Apakah kami sudah terhubung dengan vicon?

46. SAKSI TERMOHON:

Sudah, Pak.

47. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Petugas vicon atau personel yang ada di Universitas Sam Ratulangi apakah bisa jelas mendengar suara saya?

48. PETUGAS VICON:

Bisa, Pak. Bisa, Pak, jelas.

49. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Saudara Saksi yang di UNSRAT, Saudara beragama apa?

50. SAKSI TERMOHON:

Muslim, Pak. Islam.

51. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Islam?

52. SAKSI TERMOHON:

Ya

53. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Satu orang saja, ya? Yang memberikan kesaksian lewat vicon hanya satu orang?

54. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Dua orang, Yang Mulia.

55. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dua orang?

56. SAKSI TERMOHON:

Dua orang.

57. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dua-duanya Muslim?

58. SAKSI TERMOHON:

Ya. Muslim.

59. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Hah?

60. SAKSI TERMOHON:

Muslim, muslim.

61. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, Muslim semua? Mohon (...)

62. SAKSI TERMOHON:

Dua-duanya Muslim.

63. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, mohon menghadap ke, ini ... maju Bapak yang ... yang akan disumpah menghadap kepada kami. Tolong petugas untuk menyiapkan Alqurannya.

Saudara yang di UNSRAT, untuk pengambilan sumpah akan dipandu oleh Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams bersama-sama kami yang ada di Jakarta Mahkamah Konstitusi. Mohon di simak lafal sumpahnya. Mohon berkenan Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Untuk yang disumpah yang beragama Islam, tangannya lurus ke bawah. Ikutin lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim, demi Allah Saya bersumpah sebagai bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

65. SAKSI BERAGAMA ISLAM

"Bismillahirrahmaanirrahiim, demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang agama Kristen ya Pak, semua? Kristen semua, ya?

Biasa bersumpah atau berjanji? Berjanji, ya? Baik, ikuti saya.

"Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

67. SAKSI BERAGAMA KRISTEN

"Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

68. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Mohon balik ke tempat.

Untuk sesi ini mohon berkenan Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams untuk memandu persidangan.

69. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih Pak ketua.

Kita akan mulai dari Saksi Pemohon untuk PHPU Legislatif Nomor Pekara 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Pertama, Steven Zeekon ya. Nanti yang kedua Maxi Milliand Rawung dan yang ketiga, Jeffry Polii ya.

Siapa yang lebih dahulu atau sesuai dengan urutan di sini, urutan pertama Steven B Zeekon.

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PHILIAN SINAGA

Sesuai dengan urutan, Yang Mulia. terima kasih.

71. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. baik, kepada Saksi. Saudara pada waktu pemilihan umum sebelum dan waktu pelaksanaan itu sebagai apa?

72. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: STEVEN B ZEEKEON

Sebagai Saksi di PPK Kecamatan Tuminting.

73. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, Saudara akan menjelaskan pertama, yang disini yang disampaikan oleh Pemohon proses rekap perhitungan suara hasil pemilu di kecamatan Tuminting. Kemudian rekomendasi panwascam untuk hitung ulang surat suara di TPS 46 Kelurahan Maasing. Yang ketiga, proses rekapitulasi perhitungan suara hasil pemilu 2019 di kota Manado. Ketiga hal itu yang disampaikan oleh Pemohon pokok-pokok keterangan Saksi.

Ya, silakan sampaikan secara singkat, padat, dan menjawab pokok-pokok keterangan yang disampaikan. Silakan!

Yang pertama, tentang proses rekap perhitungan suara hasil pemilu di Kecamatan Tuminting.

74. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: STEVEN B ZEEKEON

Terima kasih Majelis, untuk proses rekapitulasi Pleno Kecamatan Tuminting dimulai pada tanggal 21.

75. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Mohon maaf, itu mungkin bisa di potong langsung ke poinnya saja. Poinnya apa yang terjadi di situ. Jadi, jam apanya ini, itu enggak pentinglah kita mungkin ... anunya. Kecuali harinya itu ada masalah. Mohon maaf, silakan langsung poinnya saja.

76. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: STEVEN B ZEEKEON

Oke, jadi untuk proses pleno, terjadi dalam "kericuhan" khusus untuk kelurahan Maasing. Karena plano sudah penuh dengan coretan dan apa yang tertulis di Plano khusus di TPS 4 dan TPS 6 tidak sesuai dengan C-1 yang ada pada kami saksi. Yaitu, suara Partai Golkar sesuai dengan C-1 yang ada pada kami TPS 4 berjumlah 12. Di plano DA-1 menjadi 57, sehingga terjadi perubahan atau ketambahan 45 suara.

77. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pada waktu di PPS demikia?

78. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: STEVEN B ZEEKEON

Waktu di TPS sesuai C-1 yang ada pada kami, suara Golkar=12.

79. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kemudian, pada waktu di PPK?

80. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: STEVEN B ZEEKEON

Pada waktu di PPK terjadi perubahan menjadi 57.

81. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Saudara berkeberatan dan memberikan catatan dan tanda tangan di DA-1-nya?

82. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: STEVEN B ZEEKEON

Tidak. Tidak tanda tangan di Formulir DA-1, tapi kami mengajukan keberatan.

83. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Ada hal lain yang mau saya sampaikan ... yang Saudara sampaikan?

84. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: STEVEN B ZEEKEON

Ya. Untuk TPS 6 suara Golkar sesuai C-1 yang ada pada kami=29. Terjadi perubahan di DA menjadi=39. Sehingga ada penambahan 10 suara.

85. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Terhadap hal yang demikian TPS 4 dan TPS 6 Kelurahan Maasing itu sudah diajukan ke Bawaslu oleh Pemohon.

86. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: STEVEN B ZEEKEON

Sudah dilakukan permohonan untuk sidang di Bawaslu.

87. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya nanti, saya kira nanti di Bawaslu akan memberikan ... apa ... keterangannya. Karena ini sudah keluar Putusan Bawaslu terhadap hal itu, ya. Ada hal lain yang mau Saudara sampaikan? Cukup?

88. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: STEVEN B ZEEKEON

Cukup.

89. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Cukup. Baik, yang kedua, Saudara Maxi Milliand Rawung. Ya hampir sama hal-hal yang akan dikemukakan sebagai keterangan saksi, pokok-pokoknya. Silakan!

90. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAXI MILLIAND RAWUNG

Terima kasih, Majelis. Saya Maxi Rawung, mendapat mandat dari Partai Demokrat yang ditandatangani oleh Ketua, Ibu Norce Van Bone untuk menjadi saksi di Kecamatan Tuminting, Kota Manado Dapil IV Provinsi Sulawesi Utara.

91. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Maaf, saya anu.

92. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAXI MILLIAND RAWUNG

Ya.

93. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bapak Saksi mandat dari Partai Demokrat.

94. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAXI MILLIAND RAWUNG

Partai Demokrat.

95. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke.

96. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sama seperti tadi, proses rekapnya yang disampaikan oleh Steven.

97. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAXI MILLIAND RAWUNG

Substansinya sama, tapi agak berbeda.

98. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Apa itu?

99. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAXI MILLIAND RAWUNG

Berbeda pada waktu tanggal 24. penghitungan Kelurahan Islam, saya mendapati, menemukan di pekarangan kecamatan, kotak suara TPS 4 Kelurahan Maasing. Dimana di situ ada oknum PPK, Bapak Eko Zakarias dan oknum Komisi KPU, Bapak Ismail bersama dengan PPS sedang ... dan laptop sedang mencocokkan data-data itu. Kemudian, saya dekati mereka dan berkata, "Ih, ini bikin apa ini?" saya bilang begitu. Karena saya lihat ini kotak suara, Pak, ya.

100. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

101. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAXI MILLIAND RAWUNG

Jadi, saya tegur, "Ini ada apa ini? Kok kotak suara di luar begini."
Mereka sampaikan, "Oh, cuma memang bikin pencocokan data."
Saya terus mengata ... langsung mengatakan bahwa ini tindakan pidana, segera masukkan itu kertas-kertas kembali ke kotak TPS 4 dan memang mereka lakukan itu. Dikembalikan ke kotak TPS ... kotak (...)

102. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

103. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAXI MILLIAND RAWUNG

TPS 4 dan Bapak Eko langsung masukkan ke dalam.

104. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pada waktu di kecamatan di PPK, Saudara menyampaikan keberatan dan tanda tangan?

105. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAXI MILLIAND RAWUNG

Bagaimana?

106. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Di PPK di kecamatan.

107. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAXI MILLIAND RAWUNG

Ada (...)

108. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Waktu perhitungannya, rekap di kecamatannya.

109. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAXI MILLIAND RAWUNG

Ya, jadi, itu belum ... belum masuk pada pem ... Kelurahan Mahawu, masih di kelurahan Kampung Islam.

Nah, pada tanggal 25 masuk di kelurahan karena 5 hari. Penghitungan kelurahan, lamanya itu.

110. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebentar Bapak ... Pak Maxi. Kasus itu Bapak laporkan ndak? Yang Bapak temukan orang-orang yang mencocokkan?

111. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pidana itu.

112. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bapak laporkan?

113. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAXI MILLIAND RAWUNG

Ada di DA-2 itu.

114. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ndak, maksudnya kejadian Bapak menemukan itu, Bapak laporkan?

115. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAXI MILLIAND RAWUNG

Itu saya tidak laporkan.

116. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Hah?

117. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAXI MILLIAND RAWUNG

Saya tidak laporkan.

118. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, Bapak tidak laporkan.

119. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAXI MILLIAND RAWUNG

Ya.

120. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Lalu, buat apa itu cerita tadi itu? Ya. Lalu, untuk apa cerita tadi itu?

121. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAXI MILLIAND RAWUNG

Itu kan sudah diakui waktu di Bawaslu.

122. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, saat ... terus jadi temuan atau bagaimana? Kok bisa diakui?

123. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAXI MILLIAND RAWUNG

Ya, temuan. Karena itu menjadi rangkaian ... apa ini ... penghitungan TPS 4 selanjutnya, Pak.

124. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya.

125. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAXI MILLIAND RAWUNG

Bahwa itu kotak sudah terbuka.

126. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, akhirnya jadi temuan?

127. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAXI MILLIAND RAWUNG

Ya, jadi temuan.

128. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi kemudian (...)

129. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAXI MILLIAND RAWUNG

Waktu (...)

130. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi ada penyelesaian lalu?

131. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAXI MILLIAND RAWUNG

Kita ... jadi ... kita suruh buka. Buka pada waktu itu, DAA-1 itu penuh dengan coretan. Kemudian, dari PPP dia lihat, dia minta, dia lihat lagi kepada ini kotak C-1 itu kosong. Sehingga kami minta lagi, jadi 3 ini permintaan. Kami minta lagi daftar hadir.

132. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, okelah. Nggak itu kita cerita selanjutnya.

Nah, maksudnya terhadap peristiwa pembukaan itu bagaimana penyelesaiannya?

133. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAXI MILLIAND RAWUNG

Nah, penyeles ... terjadi beda data di situ antara PPK, PPS, dengan panwas.

134. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Enggak, enggak. Bukan ... bukan soal beda datanya! Peristiwanya itu sendiri yang menurut Bapak merupakan per ... Bapak bilang itu, kan "Oh ini tidak boleh."

135. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAXI MILLIAND RAWUNG

Ya.

136. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

"Ini sudah tindak pidana." Begitu Bapak bilang, kan?

137. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAXI MILLIAND RAWUNG

Ya ya.

138. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, terus apa ... penyelesaiannya?

139. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAXI MILLIAND RAWUNG

Langsung dimasukkan itu, Pak kotak suaranya.

140. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, oke itu dimasukkan. Tapi tidak ada tindak lanjut dari itu? Yang menurut Bapak pidana itu? Bapak lakor ... laporkan ke Gakkumdu apa tidak? Itu maksud saya.

141. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAXI MILLIAND RAWUNG

Tidak.

142. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya sudah.

143. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAXI MILLIAND RAWUNG

Tidak. Tetapi waktu buka kotak suara TPS 4, nah ini kotak yang saya lihat. Saya begitu.

144. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Disampaikan ke panwas?

145. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAXI MILLIAND RAWUNG

Ya. Panwas malah menyampaikan bahwa "Oh, ini PSU."
Tetapi dibentak oleh Ketua PPK, "Diam ngana!" begitu prosesnya,
Pak.

"Diam ngana!"

146. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ngana tidak boleh omong soal ini, begitu ya? Oke.

147. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAXI MILLIAND RAWUNG

Itu ... itu prosesnya, Pak.

148. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ada lagi yang akan Saudara sampaikan?

149. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAXI MILLIAND RAWUNG

Nah, kemudian juga terjadi yang sama ketika pencocokan data di
TPS 6 itu (...)

150. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

151. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAXI MILLIAND RAWUNG

Partai Golkar yang ada di data kami itu 29, kok dibacakan oleh
PPS itu 39? Sehingga ketika itu kembali lagi saya interupsi, interupsi
pimpinan. Kami dari saksi-saksi Partai Demokrat mempunyai data yang
berbeda.

152. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

153. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAXI MILLIAND RAWUNG

Jadi, ketika disandingkan itu kita punya data saksi itu sama. Data PPK itu beda, data lagi itu di panwas itu beda, Pak. Sehingga, disuruh buka lagi, kembali lagi itu kejadian dan pada waktu itu kita minta bahwa tolong semua ada atasan di sini. Ada panwas, ada KPU, kami juga ada pimpinan, silakan bertanya. Kalau seandainya kotak ini tidak bisa dibuka ... eh, perhitungan manual tidak bisa dibuka, kami akan mengikuti prosedur ini.

154. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Sekarang ... akhirnya bagaimana?

155. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAXI MILLIAND RAWUNG

KPU pertama itu mengatakan bahwa harus dibuka, panwas mengatakan. Bapilu mengatakan "Harus dibuka!"

Tetapi karena itu waktu Maghrib, kita kan kalau di sana biasa itu kalau jam setengah ... pukul lebih 18.30 WITA itu istirahat semua, kasih kesempatan untuk saudara-saudara kita untuk salat. Nah, habis itu makan, jadi istirahat, Pak. Kemudian setelah pukul 19.30 WITA itu, kembali dibuka.

Ketika pleno dibuka kembali, panwas berdiri. Bahwa setelah hasil pertemuan antara KPU dengan Bapilu atau apa ya, maka kotak suara ini tidak bisa lagi dibuka. Itu kejadiannya, Pak. TPS 4 dan TPS 6 sampai ribut.

156. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, Saudara menyampaikan keberatan pada waktu di pleno di kecamatan?

157. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAXI MILLIAND RAWUNG

Ya.

158. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ada saksi-saksi lain juga yang menyatakan keberatan?

159. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAXI MILLIAND RAWUNG

Ada, Pak.

160. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

161. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAXI MILLIAND RAWUNG

Itu kita di (ucapan tidak terdengar jelas) ada dari PPP.

162. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Cukup, ya?

163. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAXI MILLIAND RAWUNG

Ya.

164. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, saya kira cukup. Kemudian dari Saudara Jeffry Polii? Ya!

165. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JEFFRY POLII

Terima kasih.

166. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ini, di sini disebutkan akan menerangkan tentang rekap yang di tingkat kotanya, ya? Ya, silakan!

167. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JEFFRY POLII

Terima kasih, Pak Hakim. Saya Saksi PDI Perjuangan yang mendapatkan mandat bertugas di KPU Kota Manado dalam rangka rekapitulasi tingkat Kota Manado. Permasalahan Tuminting, khususnya TPS 4, TPS 6 Maasing ini sudah diangkat dalam Rapat Pleno KPU dan ini kita tanyakan berdasarkan apa masukan dari teman-teman saksi di tingkat kecamatan. Dengan alasan waktu yang sangat mepet dan sempit, maka permintaan kami untuk menghitung kembali kertas suara ini karena angka-angka ini ada keberatan yang tidak ditindaklanjuti di tingkat kecamatan karena Pleno KPU ... Pleno PPK Tuminting diantar, dipindahkan, di-take over atau pindah tempat, bahasa dari teman-teman KPU pindah ke kantor KPU. Dari Kecamatan Tuminting pindah ke KPU.

168. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kot ... Kota Manado?

169. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JEFFRY POLII

Kota Manado karena tidak selesai di tingkat kecamatan.

170. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

171. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JEFFRY POLII

Saya yang ditugaskan partai di tingkat kota, mempertanyakan itu ... mempertanyakan itu dan minta ditindaklanjuti. Bertepatan juga saya ditugaskan di ... saksi di provinsi, Pak Hakim.

172. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

173. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JEFFRY POLII

Karena tidak ditindaklanjuti di tingkat kota, cuma diminta bikin saja form keberatan, karena waktu yang sudah tidak cukup. Karena kalau mau hitung satu-satu lagi ini kertas suara kayak di TPS tidak cukup

waktu, alasan dari teman-teman penyelenggara KPU, maka kita cuma disodorkan form keberatan. Setelah sampai ke provinsi, ini dipertanyakan lagi oleh saya, tapi bahasa Komisioner KPU Provinsi bahwa dorang sudah disepakati. Permasalahan kota dan kabupaten tidak lagi dibahas dalam forum Pleno KPU Provinsi. Nah, itu yang keempat kami bingung, ini mau balik ke mana ini? Maka ada bahasanya, ini diantar saja sampai ke MK.

174. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Ada lagi yang Saudara sampaikan? Cukup?

175. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JEFFRY POLII

Cukup.

176. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Baik, mungkin Pemohon ada satu yang bisa ditanyakan ke Saksi, satu saja, ya!

177. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PHILIAN SINAGA

Baik, Yang Mulia. Terima kasih ...

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PHILIAN SINAGA

Pertanyaan untuk Saksi, Jeffry Polli yang hadir sebagai Saksi Mandat untuk PDI Perjuangan di tingkat Kota Manado. Berapa jumlah suara PDI Perjuangan di Dapil IV Kota Manado? Kemudian, berapa jumlah partai ... suara Partai Golkar di dapil yang sama? Terima kasih.

179. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Cukup itu, ya? Ya.

180. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JEFFRY POLII

Terima kasih.

181. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Panjang ininya ... uraiannya?

182. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JEFFRY POLII

Angkanya, Pak, yang ditanya.

183. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, akumulasinya saja.

184. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JEFFRY POLII

Oh, total?

185. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

186. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JEFFRY POLII

Jadi, suara Partai Golkar berdasarkan Berita Acara KPU yang keluar=3.051, PDI=9.036. Yang seharusnya berdasarkan hitungan kami berdasarkan C-1, Golkar perolehan suaranya hanya 29.996, ada penambahan suara di situ=55 suara. Yaitu TPS 4=45 dan TPS 6=10.

187. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Jadi cukup, ya? Saudara sudah tanyakan, sekarang kita cek ke Termohon ke KPU yang di video conference, ya?

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PHILIAN SINAGA

Ya, Yang Mulia.

189. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, siapa yang di sana?

190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PHILIAN SINAGA

Yang ini yang PPK Eko, Yang Mulia.

191. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ada Saudara Eko?

192. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO RIZKI ZAKARIA

Ya. Siap, Yang Mulia. Hadir.

193. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PHILIAN SINAGA

Yang pakai kemeja biru, Yang Mulia.

194. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Saudara menanggapi keterangan dari Saksi siapa?

195. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO RIZKI ZAKARIA

Saksi Steven B Zeekeon dan Saksi Maxi Milliand Rawung, Ketua.

196. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, silakan!

197. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO RIZKI ZAKARIA

Oke. Jadi, Kelurahan Maasing ini, Ketua, adalah kelurahan ke 3 yang kurang lebih dia sudah selesai dan Kelurahan Maaasing ini dia sudah ada DAA-1-nya dan ditandatangani oleh para saksi dan salah satu di situ kalau, Yang Mulia, periksa di situ ada tanda tangan dari PDIP sendiri.

Nah, untuk masalah seperti Pak Maxi Raung tadi katakana, bahwa yang ada bercoret-coret, saya membantah itu. Membantah dalam artian itu bukan tanggal 24, itu bukan tanggal 24. Kelurahan Maasing itu sudah selesai fix pada tanggal 26 Juni. Kejadian seperti itu bukanlah Kelurahan Islam, yang kami lihat Plano yang ... yang mereka menuduh melihat

Plano itu, membuka Plano dan mencoret-coret, itu bukan Kelurahan Islam dan bukan pada tanggal 24 seperti yang dia bilang tadi.

Nah, pada kenyataannya di PPK Tuminting itu sendiri, kami sudah selesai dan itu dia terjadi pada tanggal ... Mei kalau tidak salah. Saat itu kami hanya akan menyesuaikan, kami hanya akan menyesuaikan data ... jumlah data pemilih, jumlah data pemilih. Karena pertama, kami ada terkendala pada awal-awal Pleno PPK Tuminting itu terkendala masalah sarana dan prasarana. Jadi, secara perhitungannya kita menggunakan metode manual, Yang Mulia. Jadi karena metode manual, masih ditulis kertas, kita tulis kertas angka-angkanya dan pada saat kita rekap masuk ke situng, masuk ke data situng agregat. Ternyata posisinya ada yang merah, ada yang merah.

Terlebih dahulu itu ada kesempatan saksi bahwa kita sudah bilang ke mereka bahwa ada yang merah, kita minta persetujuan apakah bisa kita menyesuaikan dengan yang merah-merah ini. Tapi dengan catatan, dengan perjanjian bahwa yang merah-merah ini dia kita tidak mengubah, kita tidak mengubah jumlah perolehan suara tiap partai. Tidak merubah, hanya masalah data pemilihnya saja. Nah, (...)

198. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, saya kira ya cukup ya. Saudara tahu bahwa memang ada keberatan dari Saksi?

199. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO RIZKI ZAKARIA

Kalau untuk Maasing sudah ... sudah klir, Ketua. Pada tanggal 26 Juni itu ada DAA-1 dikeluarkan dan planonya juga ditandatangani oleh mereka. Kalau ... kalau keberatan itu, yang mereka tuduhkan itu hanya tuduhan katanya kami mencoret-coret plano. Padahal kalau ada foto plano di kita ... ada foto plano di kita, plano DAA-1 nya. Yang mana bahwa DAA-1-nya itu tercoret-coret itu, dia memang pada saat perhitungan ... perhitungan Maasing itu ... itu tercoret karena memang angkanya diganti. Karena untuk TPS 4 Maasing, untuk TPS 4 Maasing itu, Ketua, dia terjadi penghitungan ulang surat suara. Jadi, jumlahnya 57 bukan 12 seperti Saudara Saksi Steven Zeekeon.

200. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Berapa jumlahnya 57?

201. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO RIZKI ZAKARIA

57 untuk suara Golkar.

202. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

203. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO RIZKI ZAKARIA

Kita sudah ... ya.

204. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Saya kira cukup, ya?

205. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO RIZKI ZAKARIA

1 lagi Ketua tambahan sedikit.

206. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

207. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO RIZKI ZAKARIA

Masalah kotak dan corat-coret plano, saya sudah berproses dari Bawaslu kota sampai Bawaslu RI untuk masalah itu, Ketua.

208. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Berikutnya Saksi Basyarudin Kiyai Demak, ya?

209. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BASYARUDIN KIYAI DEMAK

Siap, Ketua.

210. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Saudara ketua PPS Maasing, Kecamatan Tuminting, betul ya?

211. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BASYARUDIN KIYAI DEMAK

Ya.

212. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. silakan! Apa yang Saudara tanggapi terhadap keterangan Saksi yang sudah Saudara dengar.

213. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BASYARUDIN KIYAI DEMAK

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera.

Saya pada tanggal ... pada waktu pleno, pada saat pembacaan hasil dari KPPS untuk pleno di kecamatan, untuk TPS 4, itu ada terjadi pada saat pembacaan itu ada salah satu saksi. Salah satu saksi yang merasa keberatan untuk menghip ... minta membuka kotak. Setelah kemudian, karena ini tahapan, saya meminta izin kepada panwas dan ... panwascam dan panwaslu. Kemudian mereka merekom untuk membuka kotak pada TPS 4. Kemudian, tahapan berikutnya kita melihat plano. Setelah melihat plano juga, mereka saksi yang keberatan tadi tidak juga merasa puas, sehingga terjadi tahapan akhir, perhitungan surat suara ulang.

Kemudian, pada saat perhitungan surat suara ulang, di sini apa yang disampaikan tadi perolehan suara itu sebenarnya tidak benar. Karena saya bacakan dari awal, dari hasil KPPS, jumlah dari perolehan suara Partai Golkar sebesar 57, setelah dihitung tetap jumlahnya tetap 57. Demikian, Pak Yang Mulia.

214. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, Saudara anggap cukup, ya?

215. SAKSI TERMOHON: BASYARUDIN KIYAI DEMAK

Ada TPS 6 lagi, Pak.

216. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

TPS 6?

217. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BASYARUDIN Kiyai DEMAK

Ya. Untuk TPS 6, pada saat lanjutan pada TPS 4 selesai, maka diteruskan pembacaan dari TPS 5 sampai dengan TPS 6 dan itu sampai TPS 6, itu tidak ada keberatan dari saksi dengan jumlah yang dibacakan perolehan dari hasil dari KPPS untuk Partai Golkar sebesar=39. Kemudian dilanjutkan dan sampai TPS 18, sehingga Maasing DAA-1 dianggap selesai. Demikian, Yang Mulia.

218. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Baik. Terima kasih, karena di sini disebutkan itu yang akan disampaikan keterangan dari Saksi-Saksi. Yang Eko Rizki Zakaria dan Basyarudin Kiyai Demak, ya? Saya kira cukup yang untuk video conference. Ya. Cukup ya, bisa ditutup.

219. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Mungkin untuk Saksi yang ada di sini, Yang Mulia.

220. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Ini Saksi berikut yang ada di sini adalah Sunday Daud A. Rompas. Ya, silakan! Apa yang akan Saudara sampaikan?

221. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebelumnya, Yang Mulia. Mungkin ini ada kesaksian yang belum ditanggapi tadi, yang kesaksian dari Pak Jeffry Polii, mengenai keadaan itu, siapa yang akan menerangkan?

222. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUNDAY DUAD A. ROMPAS

Rekap di kota, Yang Mulia?

223. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, yang direkap di tingkat kota, ya, katanya ada permintaan untuk masih mempersoalkan TPS 4, TPS 6 itu tambahan, cuman disodori form keberatan. Dan kemudian di tingkat provinsi dipersoalkan lagi, tapi dikatakan di sini ... di sini pun sudah tidak forumnya lagi untuk mempersoalkan itu. Bawa saja ke Mahkamah Konstitusi. Nah, Bapak tanggap, Bapak mau menanggapi itu?

224. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUNDAY DUAD A. ROMPAS

Siap.

225. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Terima kasih.

226. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUNDAY DUAD A. ROMPAS

Izin, Yang Mulia. Pertama, saat proses Pleno di Kota Manado atas permintaan Saksi PDIP, maka mereka meminta untuk pencermatan kembali terhadap C-1 TPS 4 Maasing dan C-1 dari TPS 6 Maasing. Maka kemudian peserta rapat sepakat membuka salah satu kotak dari 13 kotak yang sudah digeser milik Kecamatan Tuminting di tingkat kota.

Saat dibuka, disandingkanlah DAA-1 yang ada di dalam kotak dengan C-1 yang dimiliki oleh saksi PDIP maupun saksi-saksi beberapa parpol lain, maupun saksi ... maupun C-1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Manado.

227. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebentar. Berarti ada proses anu ... ada proses penghitungan kembali di situ?

228. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUNDAY DUAD A. ROMPAS

Kalau di kota, penyandingan, Pak.

229. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Penyandingan.

230. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUNDAY DUAD A. ROMPAS

Jadi saat penyandingan, ditemukanlah C-1 dari TPS Maasing yang dimiliki oleh PDIP, berbeda dengan yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Manado, partai-partai lain maupun yang DAA-1 yang diambil dari dalam kotak.

Seiring dengan disandingkannya dengan hasil yang berbeda dari PDIP, maka kemudian saksi PDIP tidak ingin melanjutkan lagi sandingan untuk C-1 TPS 6. Maka kami memandangi itu klir.

Sehingga, DAA-1 yang dimiliki oleh KPU di dalam kotak, yang sesungguhnya merupakan hasil yang dihitung kembali saat Pleno di Kecamatan Tuminting. Dengan jelas menunjukkan suara Partai Golkar itu untuk TPS 4=57, untuk TPS 6=39. Ya, itu yang dimiliki, Pak. Tidak ada yang berubah.

Kemudian ketika diminta untuk menghitung kembali setiap surat suara, memang momentum itu tidak memungkinkan karena penyandingan itu sudah dilakukan. Sementara waktu itu tanggal 7, tanggal 7 Mei (...)

231. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Mei, 7 Mei?

232. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUNDAY DUAD A. ROMPAS

7 Mei 2019, kalau melihat surat edaran KPU 781, batas waktu melakukan Pleno itu di tingkat kota tanggal 7 dan Manado sudah terjadwal sebagai Kab/Kota terakhir untuk siap pleno tanggal 8 di provinsi. Berdasarkan surat edaran 79 ... 781.

Soal itu tidak diangkat lagi, dipersoalkan lagi di tingkat provinsi karena kesepakatan waktu itu untuk Pleno DPR Kota Mana ... Kota/Kabupaten sudah diselesaikan sesuai dengan levelnya di tingkat kota dan kabupaten.

233. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi?

234. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUNDAY DUAD A. ROMPAS

Jadi memang tidak dipersoalkan lagi, apalagi memang dalam pandangan kami saat Pleno klir untuk TPS 4 dan TPS 6 Maasing.

235. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Maaf, Pak?

236. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, silakan!

237. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Maksudnya itu, klir itu, setelah dilakukan persandingan itu?

238. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUNDAY DUAD A. ROMPAS

Ya, setelah persandingan itu, PDIP ... saksi PDIP yang berinisiatif meminta persandingan hanya sebatas di TPS 4. TPS 6 tidak dilanjutkan lagi karena disaat TPS 4, C-1-nya berbeda.

239. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sudah ada perbedaan itu?

240. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUNDAY DUAD A. ROMPAS

Ya, hanya PDIP yang berbeda datanya, Pak.

241. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ya, dan kemudian minta untuk tidak dilanjutkan lagi TPS 6?

242. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUNDAY DUAD A. ROMPAS

Sudah. Ya.

243. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dan karena itu dianggap selesai lalu?

244. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUNDAY DUAD A. ROMPAS

Ya.

245. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, lalu? Terus yang di provinsi bagaimana? Bapak tahu kejadiannya di provinsi?

246. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUNDAY DUAD A. ROMPAS

Saya hadir saat rekap di provinsi dan ketika diangkat, pimpinan rapat pada waktu itu melihat tidak pada tempatnya mempersoalkan lagi data-data rekapitulasi yang sudah diselesaikan di tingkat kabupaten dan kota.

247. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Karena alasan itu sudah tidak dilakukan persandingan itu? Itu alasannya?

248. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUNDAY DUAD A. ROMPAS

Di tingkat provinsi tidak lagi, Pak.

249. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, maksudnya alasannya karena waktu di tingkat kabupaten dan kota sudah diselesaikan dengan persandingan itu?

250. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUNDAY DUAD A. ROMPAS

Ya, sudah tuntas.

251. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya, baik. Tapi ngomong-ngomong ya, pak, bagaimana cara saya mengucapkan nama, nama, nama Bapak awal itu? Sunday kah atau?

252. SAKSI TERMOHON: SUNDAY DUAD A. ROMPAS

Sunday, Pak.

253. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sunday, ya? Jadi memang Sunday Bahasa Inggris ya, Pak, ya?

254. SAKSI TERMOHON: SUNDAY DUAD A. ROMPAS

Ya.

255. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke, ini saya takut salah salah manggil aja nanti.

256. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, dari Pihak Terkait ini dari Golkar, Pak Djonij Kasuehuna, ya? Apa yang akan Saudara sampaikan? Berikan keterangan sebagai Pihak Terkait, silakan! Pakai mik, mik. Ada itu mic-nya.

257. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DJONIJ KASUEHUNA

Terima kasih, Yang Mulia. Saya adalah salah satu Saksi dari Partai Golkar di tingkat kecamatan. Yang saya mau sampaikan adalah proses rekapitulasi di tingkat kecamatan itu dalam proses rekapitulasi ini, itu per Kelurahan di sesuaikan dengan abjad. Itu dimulai dari Karangria, Bitungkarangria, Kelurahan Islam, kemudian Maasing dan selanjutnya.

Yang saya mau sampaikan di sini, untuk proses rekapitulasi di Kecamatan Tuminting, khususnya Kelurahan Maasing untuk TPS 4 ini, dalam proses perhitungan suaranya itu disampaikan oleh PPS hasil dari C-1 KPPS. Dalam penyampaian itu sampai pada proses pembacaan Partai PKS perolehan suaranya Partai PKS (...)

258. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Saksinya, ya? Saksinya?

259. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DJONIJ KASUEHUNA

Ya, Saksinya mengajukan keberatan. Hal yang sama ketika PKS mengajukan keberatan, PDIP juga melakukan keberatan. Alasan dari PDIP mengajukan keberatan bersama dengan PKS adalah soal perolehan suara. Untuk TPS 4 Kelurahan Maasing ini, PDIP memperoleh suara dengan rincian, untuk perolehan suara partai itu=3 suara, dan caleg atas

nama Zakaria Tatukode itu=1 suara. Tetapi dalam jumlah itu bukan 4. Tertulis=31.

260. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, jadi 3 dan 1 disandingkan?

261. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DJONIJ KASUEHUNA

Disandingkan. Kemudian (...)

262. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Bukan ditambahkan, ya?

263. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DJONIJ KASUEHUNA

PKS mengajukan keberatan soal perolehan suara atas nama ... ketika dibacakan oleh PPS, untuk atas nama Dr. Suyanto itu berjumlah 60 suara. Sementara pada C-1 yang dimiliki oleh PKS itu 60 suara itu bukan pada Dr. Suyanto. Sehingga Proses ini lah, sehingga terjadi pembukaan kotak. Nah itu seperti yang dijelaskan oleh dari PPK tadi. Pembukaan kotak ketika dibuka, dilihat planonya, juga karena ada tulisan yang tidak jelas maka dilanjutkan dengan perhitungan suara ulang dengan membuka kertas suara, sehingga prosesnya terjadi lagi.

PDIP dalam perolehan suara 4 itu rinciannya berubah, dari 3 dan 1 menjadi 22, setelah perhitungan suara. Sementara Golkar tetap=57 suara, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk TPS 6 itu tidak ada keberatan dari siapapun. Sehingga prosesnya itu berjalan dan suara yang diperoleh Golkar tetap 39 suara.

Saya kira demikian, Yang Mulia.

264. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Cukup yang akan Saudara sampaikan? Cukup?

265. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DJONIJ KASUEHUNA

Cukup.

266. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik saya kira kita minta ke Bawaslu ini untuk apa ... memberikan keterangan terhadap hal yang sudah disampaikan oleh Saksi dan juga tadi sudah ada Surat Putusan Bawaslu, ya? Nomor 16.LPPL/V/2019, ya? Coba dijelaskan! Selain hal-hal yang tadi perlu diberikan keterangan.

267. BAWASLU SULAWESI UTARA: SUPRIYADI PANGELLU

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

268. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dari mana ini? Bawaslu?

269. BAWASLU SULAWESI UTARA: SUPRIYADI PANGELLU

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

270. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Bawaslu provinsi?

271. BAWASLU SULAWESI UTARA: SUPRIYADI PANGELLU

Ya.

272. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

273. BAWASLU SULAWESI UTARA: SUPRIYADI PANGELLU

Terkait dengan permohonan Pemohon yang perkara 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Bawaslu nanti jelasnya saya izin, Yang Mulia, kalau diperkanankan.

274. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pak, tanggapi yang keterangan Saksi saja.

275. BAWASLU SULAWESI UTARA: SUPRIYADI PANGELLU

Ya.

276. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Enggak usah masuk ke permohonan lagi. Yang diterangkan khususnya yang berkaitan dengan Paj Jeffry Polii tadi itu, Pak.

277. BAWASLU SULAWESI UTARA: SUPRIYADI PANGELLU

Lebih konferensif kalau saya izin, Yang Mulia.

278. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Boleh kalau menjelaskan konteks itu boleh.

279. BAWASLU SULAWESI UTARA: SUPRIYADI PANGELLU

Kami juga menghadirkan Bawaslu Kota Manado supaya lebih Komprehensif aspek pengawasan proses rekapitulasi tingkat kota. Maka kalau di izinkan, Yang Mulia. Nanti secara komprehensif bahwa Bawaslu Kota Manado menjelaskan termasuk rekomendasi pembukaan kotak untuk penyaringan data.

280. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau begitu enggak sebaiknya dari ... dari Bawa ... dari Manado dulu, ya Pak?

281. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

282. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dari yang Kota Manado dahulu deh, supaya bertingkat. Nanti terakhir baru Bapak yang provinsi, kan?

283. BAWASLU SULAWESI UTARA: MARWAN KAWINDA

Bawaslu kota Manado Marwan Kawinda.

284. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Siapa namanya?

285. BAWASLU SULAWESI UTARA: MARWAN KAWINDA

Marwan Kawinda.

286. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Marwan Kapinda?

287. BAWASLU SULAWESI UTARA: MARWAN KAWINDA

Kawinda.

288. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kawinda, ya.

289. BAWASLU SULAWESI UTARA: MARWAN KAWINDA

Terima kasih, Yang Mulia. seperti yang di permasalahan oleh Saksi dari PDIP itu, memang waktu ... waktu pleno di kota Manado itu memang ada permintaan untuk penyandingan dana ... data oleh saksi dari PDIP. Sehingga Bawaslu sendiri meminta untuk dibuka data C1.Plano-nya yang TPS 6 waktu itu.

TPS 6 dibuka ternyata memang di PDIP ini datanya memang agak beda tetapi di Bawaslu dengan di C-1 yang dibuka itu atau data dari KPU itu sama seper ... dengan parpol yang lain. Sehingga itu tidak dilanjutkan ke TPS 6 waktu itu. TPS 4 yang disandingkan.

290. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

TPS 6 tidak disandingkan?

291. BAWASLU SULAWESI UTARA: MARWAN KAWINDA

Tidak karena sudah dianggap klir oleh semua, maka keberatan itu dianggap telah selesai karena memang sudah disandingkan itu. Bahwa data-data yang ada di KPU maupu Bawaslu itu ada sama dan dari Saksi peserta pemilu lainnya. Saya kira itu keterangan dari Bawaslu.

292. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terkait putusan Bawaslu Nomor 16 itu, Bawaslu Kota? Atau Bawaslu Provinsi?

293. BAWASLU SULAWESI UTARA: MARWAN KAWINDA

Bawaslu RI, Pak.

294. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, Bawaslu RI. Ya, ya. mungkin dari Bawaslu nanti menjelaskan tetapi sebelumnya dari Bawaslu Provinsi akan menjelaskan karena tadi kan ingin lebih dahulu tetapi Pak Ketua menyarankan supaya yang dari Bawaslu Kota lebih dahulu. Nah, setelah ini Bawaslu Provinsi, kemudian Bawaslu RI, ya silakan!

295. BAWASLU SULAWESI UTARA: MUSTARIN HUMAGI

Izin, Yang Mulia Mustarin Humagi dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Ingin menambahkan saja dari yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Manado terkait dengan persoalan yang di selesaikan di dengan objek TPS 4 yaitu berkaitan dengan selisih hasil suara.

Prinsipnya kami dengan kewenangan kami di tingkatan kecamatan sudah diselesaikan berkaitan dengan perselisihan. Sehingga kemudian dengan kewenangan Bawaslu yaitu melalui jajaran kami di kecamatan sudah disandingkan dan pembetulannya pada di tingkat rekapitulasi tingkatan kecamatan. Sehingga kemudian di klir, sehingga pada tingkatan rekap di tingkatan kabupaten atau Kota Manado sudah tidak ada lagi.

Terima kasih, Yang Mulia.

296. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebentar, Pak. Bapak yang dari PPK, ya? ya?

297. BAWASLU SULAWESI UTARA: SUPRIYADI PANGELLU

Saya Bawaslu.

298. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh bukan. Bawaslu yang di waktu yang ngawasi di ... di tingkat kecamatan? Enggak?

299. BAWASLU SULAWESI UTARA: SUPRIYADI PANGELLU

Siap tidak.

300. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh tidak. Oh jadi, cuman menerangkan bahwa yang di kecamatan itu sudah dianggap klir begitu, ya?

301. BAWASLU SULAWESI UTARA: SUPRIYADI PANGELLU

Siap majelis.

302. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sesuai dengan keterangan yang dari KPU tadi?

303. BAWASLU SULAWESI UTARA: SUPRIYADI PANGELLU

Bawaslu Kota Manado, Yang Mulia.

304. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ndak, yang tadi berarti cocok dengan keterangan yang disampaikan oleh Saksi dari KPU tadi?

305. BAWASLU SULAWESI UTARA: SUPRIYADI PANGELLU

Siap, Yang Mulia. cocok, Yang Mulia.

306. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tidak ada ini.

307. BAWASLU SULAWESI UTARA: SUPRIYADI PANGELLU

Siap, Yang Mulia. terima kasih.

308. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ayo, Bawaslu provinsi ingin menambahkan?

309. BAWASLU PROVINSI: SUPRIYADI PANGELLU

Cukup, Yang Mulia.

310. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Cukup.

311. BAWASLU PROVINSI: SUPRIYADI PANGELLU

Ya.

312. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik, Pak ketua.

313. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, kalau begitu berarti sudah semua kita dengar pihaknya dan pemeriksaan ini kita selesai (...)

314. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Mohon izin, Yang Mulia. Boleh?

315. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dari mana?

316. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Dari Pemohon, Yang Mulia.

317. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dari Pemohon ada 1 pertanyaan? Bagaimana?

318. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Terkait Putusan Bawaslu itu, saya ingin minta penjelasan dari Bawaslu, boleh Yang Mulia?

319. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Untuk ... ndak, nanti itu lewat kami saja ... melalui kami saja.

320. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Atau kami ingin penegasan dari Yang Mulia, apakah Putusan Bawaslu ini juga nanti akan dipertimbangkan, Yang Mulia. Terutama ada ... ada poin tentang fakta halaman 49 dalam putusan itu dan terkait amar putusan yang pada pokoknya menyatakan, tindakan terlapor yang memimpin pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Tuminting merupakan pelanggaran administratif pemilu.

321. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, kalau (...)

322. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ini putusan akhir menyatakan, Komisi Pemilihan Umum Kota Manado terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedural, dan seterusnya dalam Rapat Rekapitulasi. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara untuk memberikan peringatan tertulis. Itu, Yang Mulia.

323. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Kalau sudah menjadi bukti pasti kami pertimbangkan.

324. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Terima kasih, Yang Mulia.

325. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saudara tidak ... jangan memasuki wilayah pertimbangan Hakim. Itu sudah kami yang nanti akan itu mempertimbangkan itu, ya.

326. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Izin, Yang Mulia.

327. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, ya terima kasih itu. Berarti untuk Perkara Nomor 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk Manado IV DPRD Kota, kita sudah selesaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Para Saksi yang sudah berkenan memberikan keterangan di hadapan Mahkamah dan akan membantu Mahkamah untuk mempertimbangkan putusan ini. Dan dengan demikian, maka Pemohon ... pemeriksaan perkara ini sudah selesai. Permohonan ... ya, permohonan untuk ini nanti untuk selanjutnya tinggal menunggu panggilan sidang dari Mahkamah untuk pengucapan Putusan yang nanti akan diucapkan bersama-sama dengan permohonan yang lain.

Tapi, jangan dulu, Pak ... jangan dulu berangkat, Pak. Duduk dulu! Kami masih ada pengesahan bukti dulu.

Nah, kami mau umumkan dulu bahwa nanti akan ada panggilan sidang untuk pengucapan Putusan yang akan diucapkan bersama-sama dengan Permohonan yang lain.

Satu ada tambahan Bukti dari Pihak Terkait Partai Golkar, Bukti PT-4 sampai dengan PT-7 tidak ada catatan dari kepaniteraan mengenai soal ini. Ya, sudah kami verifikasi dan kami nyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Jadi demikian, Ibu dan Bapak. Sekali lagi terima kasih. Bapak diperkenankan untuk meninggalkan ruangan, bukan kami mengusir tetapi karena memang sidangnya sudah selesai. Kalau mau menonton boleh, tetapi di belakang. Terima kasih. Silakan meninggalkan ruangan! Karena nanti kami akan melanjutkan kepada Permohonan berikutnya dari Partai Amanat Nasional.

328. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, kita lanjutkan untuk Perkara Nomor 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Pemohonnya Partai Amanat Nasional.

Untuk Saksinya tadi Muzaqir Boven, ya? Ramlan Mangkialo, dan Madzhabulloh Ali. Diganti siapa tadi? Siapa? Fahri Dochmie? Ya ... ya. Siapa yang lebih dahulu menyampaikan? Pak Muzaqir Boven, silakan! Apa yang akan Saudara sampaikan keterangan sebagai Saksi pada Perkara Nomor 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini. Silakan!

329. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUZAQIR BOVEN

Terima kasih, Yang Mulia. Saya diberikan mandat oleh Dewan Pimpinan wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Utara untuk menjadi saksi pada Rekapitulasi Pleno KPUD Kabupaten Minahasa Utara.

330. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

331. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUZAQIR BOVEN

Dan Pleno KPUD Provinsi Sulawesi Utara.

332. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

333. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUZAQIR BOVEN

Kami pada saat rekapitulasi pada Pleno tingkat Kabupaten Minahasa Utara, Yang Mulia. Kami (...)

334. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, Saudara sebagai Saksi di sana, ya?

335. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUZAQIR BOVEN

Ya, saya sebagai saksi di Kabupaten Minahasa Utara.

336. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Di tingkat provinsi juga Saudara saksi juga?

337. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUZAQIR BOVEN

Juga sebagai saksi.

338. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, silakan!

339. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUZAQIR BOVEN

Saya mau menyampaikan bahwa ketika kami mendapatkan bahwa ada suara dari Partai Amanat Nasional yang dihilangkan pada saat Rekapitulasi Pleno KPUD Kabupaten Minahasa Utara

340. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

341. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUZAQIR BOVEN

Dan ada beberapa suara partai yang sengaja dikelembungkan. Namun yang paling mendasar adalah bahwa banyak saksi kami, khususnya di Dapil III Kabupaten Minahasa Utara, itu tidak diberikan DAA-1 oleh PPK dan ini kami laporkan ke Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara, dan kami bersidang di Bawaslu Minahasa Utara, dan hasil Putusan Bawaslu Minahasa Utara Nomor 003/ADM/BWSL.Kab/25.12/V/2019 menyatakan bahwa PPK Dapil III Kecamatan Wori, kemudian Kecamatan Likupang Barat dan Likupang Timur dinyatakan bersalah karena tidak memberikan DAA-1 kepada Saksi Partai Amanat Nasional, saksi partai.

342. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ada perintah dari Bawaslu?

343. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUZAQIR BOVEN

Perintah putusannya itu menyatakan bersalah.

344. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Memerintahkan pemungutan suara ulang atau penghitungan, tidak ada?

345. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUZAQIR BOVEN

Tidak ada.

346. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Keputusan Bawaslu Nomor berapa yang Saudara sebut?

347. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUZAQIR BOVEN

Dan itu kami lampirkan sebagai bukti, yaitu Nomor 003/ADM/BWSL.Kab/25/12/V/2019.

348. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu harusnya porsi lawyer Anda yang bicara soal dilampiran bukti itu, bukan Bapak yang harus menerangkan itu. Ya, nomornya.

349. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Nanti saya kira Bawaslu akan memberikan keterangan hal itu, ya? Putusan Bawaslu Nomor 003, saya kira yang lain saja dikemukakan.

350. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUZAQIR BOVEN

Dan saya akan sampaikan juga bahwa di Kabupaten Minahasa Utara, kebetulan juga karena saya saksi dari PAN untuk Provinsi Sulawesi Utara di KPUD karena kami tidak didib ... diberikan DAA-1 dan hasil temuan data yang dilakukan oleh Tim Data Rekapitulasi dari Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Utara, bahwa di Kabupaten Minahasa Utara khususnya di Kecamatan Likupang Barat bahwa ada suara Partai Amanat Nasional, 59 suara dihilangkan dari Caleg DPR-RI Partai Amanat Nasional.

Dan untuk Kema, Kecamatan Kema ada penambahan dari Partai Nasdem, digelembungkan sebanyak 23 suara, untuk Kecamatan Kauditan ada 17 suara, dan untuk Kecamatan Airmadidi ada 82 suara, dan untuk Kecamatan Wori ada 7 suara, dan untuk Likupang Barat ada 43 suara, untuk Likupang Timur ada 26 suara, dan untuk Kecamatan Kalawat ada 78 suara. Total suara yang digelembungkan oleh Partai Nasdem berjumlah 276 suara dan ini persandingan antara C-1 dengan DAA-1 yang kami temukan dalam data Partai Amanat Nasional.

351. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pada waktu itu Saudara mengajukan keberatan?

352. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUZAQIR BOVEN

Nah, pada waktu itu kami mencoba untuk menyampaikan keberatan kepada Pihak KPU. Tetapi jangankan bicarakan tentang keberatan, Pimpinan. Kami bicara saja tentang Dapil III yang sudah diplenokan awal untuk kami angkat kembali, itu sudah tidak diizinkan karena dianggap bahwa itu sudah direkapitulasi pada tingkatannya. Nah, data kami DAA-1 kami ini kan adalah data kecamatan.

353. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Saudara tidak minta form keberatan?

354. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUZAQIR BOVEN

Kami sudah minta, Pimpinan. Tapi itu tidak saya tuliskan.

355. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Ya, saya kira sudah, ya. Sudah cukup?

356. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUZAQIR BOVEN

Nah (...)

357. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya?

358. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUZAQIR BOVEN

Nah, kemudian nanti saya tuliskan, saya sampaikan pada Pleno Provinsi, karena dianggap bahwa pada kabupaten/kota kami tidak bisa menyampaikan itu, karena sudah dianggap oleh Kabupaten Minahasa Utara bahwa itu sudah selesai pada tingkatan pleno, pada tingkatan (...)

359. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Waktu rekap di provinsi Saudara mengajukan keberatan?

360. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUZAQIR BOVEN

Ya, saya mengajukan keberatan. Keberatan saya ada sekitar 5 poin.

361. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya sudah.

362. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUZAQIR BOVEN

Ya, saya akan bacakan (...)

363. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, sudah! Sudah, tidak usah! Karena yang penting Saudara sudah menyampaikan keberatan dan mengisi form keberatan itu, ya?

364. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUZAQIR BOVEN

Saya sudah juga mengisi juga form keberatan. Cuma, Yang Mulia mau saya sampaikan. Ketika kami berbicara untuk melakukan interupsi terhadap angka-angka perubahan yang kami sampaikan ke KPUD Provinsi, oleh KPUD Provinsi bahwa mereka tidak akan merubah angka-angka hasil perhitungan, itu sudah disampaikan kepada kami.

365. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya. Saya kira sudah ya? cukup, ya? Selanjutnya Saksi Ramlan Mangkialo betul, ya? Mangkialo, ya? Ya. Ini sama, Saudara akan menjelaskan tentang tadi disebut penggelembungan suara Partai Nasdem di beberapa kabupaten, ya? Atau apa yang akan Saudara jelaskan? Silakan!

366. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAMLAN MANGKIALO

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saya dari divisi data yang melakukan penginputan terkait dengan temuan-temuan yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional. Saya Divisi Data Dari Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

367. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pada waktu pemilu itu Saudara sebagai apa? Saksi?

368. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAMLAN MANGKIALO

Tidak, Yang Mulia. Saya sebagai orang yang menginput seluruh Form C-1.

369. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

370. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAMLAN MANGKIALO

Yang dari saksi Partai Amanat Nasioanal. Yang diserahkan kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional, Provinsi Sulawesi Utara, Yang Mulia.

371. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, silakan!

372. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAMLAN MANGKIALO

Saya hanya ingin menjelaskan ... menerangkan, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan dengan hasil Termohon bahwa suara Nasdem itu 248.666 dan suara PAN untuk versi Termohon adalah 80.732 suara. Pada saat kami dari divisi data melakukan penginputan kembali (...)

373. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ini untuk DPR RI, ya?

374. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAMLAN MANGKIALO

Untuk DPR RI, Yang Mulia.

Pada saat kami melakukan penginputan kembali, di semua ... dari 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil yang kami dapatkan adalah bahwa perolehan suara Partai Nasdem=243.598. Terjadi ketambahan suara Partai Nasdem di 15 kabupaten/kota, sebanyak 5. 068 suara.

375. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

376. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAMLAN MANGKIALO

Untuk Partai PAN, kami menemukan bahwa suara Partai PAN bukan 80.732 melainkan (...)

377. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak (suara tidak terdengar jelas) miknya agak jauh!

378. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Agak jauhkan!

379. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Agak turunkan miknya itu!

380. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Agak jarak, ya! Ya.

381. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAMLAN MANGKIALO

Untuk suara PAN, di data yang kami input kembali adalah 81.216 suara atau kekurangan perolehan suara PAN di 15 kabupaten/kota=484 suara, Yang Mulia.

382. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, itu di 15 kabupaten?

383. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAMLAN MANGKIALO

Di 15 kabupten/kota, Yang Mulia.

384. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, nanti kita cek karena menurut Pemohon itu di 9 kabupaten/kota. Nanti kita cek lagi, ya. Silakan! Ada hal lain mau Saudara sampaikan?

385. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAMLAN MANGKIALO

Baik, Yang Mulia. Terkait dengan data yang kami temukan ini, Yang Mulia. Maka dari itu, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional menolak rekapitulasi untuk tingkatan DPR RI pada tingkat rekap provinsi, Yang Mulia.

Demikian yang dapat saya sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

386. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih. Selanjutnya Saudara Fahri Dochmie yang akan menjelaskan tentang rekap di Kabupaten Minahasa utara, ya? Tadi belum (...)

387. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI DOCHMIE

Untuk DPRD.

388. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

389. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI DOCHMIE

DPRD Minahasa Utara III.

390. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, Minahasa Utara 3, ya itunya?

391. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI DOCHMIE

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.

Saya waktu itu adalah saksi dari Partai Amanat Nasional untuk DPRD Kabupaten Minahasa Utara yang pleno dilakukan pada tanggal 1 sampai tanggal 3 Mei 2019. Yang saya mau sampaikan, Pak Hakim Yang Mulia, bahwa keberatan kami sudah dilakukan sejak dari pleno di kabupaten. Yaitu terdapat dari ... saya adalah koordinator saksi-saksi di TPS di Kabupaten Minahasa Utara.

Jadi, semua C-1 saksi di TPS masuk ke saya dulu untuk kita input di tingkat kabupaten. Yang kami temukan dari semua C-1 yang masuk dari 10 kecamatan yang ada di Minahasa Utara, ada di kecamatan ... ada di dapil III, yaitu Kecamatan Wori, Kecamatan Likupang Barat, dan Kecamatan Likupang Timur, terdapat banyak kejanggalan. Yaitu C-1 tidak berkesesuaian angka-angkanya. Ada angka-angka yang tidak terisi, ada jumlahnya terisi tetapi angka di partai politik dan calon legislatif tidak terisi dan banyak C-1 yang tercoret-coret, tanpa berita acara, tanpa keterangan dari KPPS. Itu kami semua sampaikan ke KPU kabupaten saat Pleno di kabupaten. Kami meminta KPU kabupaten dalam Pleno itu untuk melakukan penyandingan data dan di apa ... dilakukan penyesuaian kembali antara data C-1 kami dan data DA-1 di 3 kecamatan tersebut. Karena ada keanehan, dari 10 kecamatan yang ada di Minahasa Utara, 3 kecamatan ini tidak diberikan kepada saksi kami ... kepada saksi semua partai, yaitu Formulir DAA-1.

392. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yaitu Kecamatan Wori (...)

393. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI DOCHMIE

Wori, Likupang Barat, dan Likupang Timur.

394. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3 Kecamatan itu?

395. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI DOCHMIE

Tidak dibuatkan, tidak diberikan, tidak ditandatangani oleh semua saksi. Bahkan terakhir bulan ini ... awal bulan ini (...)

396. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Itu ke semua partai tidak diberikan?

397. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI DOCHMIE

Ke semua partai.

398. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

DAA-1 itu kepada saksi partai tidak ada.

399. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI DOCHMIE

Tidak ada.

400. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI DOCHMIE

Tidak ada. Awal bulan kemarin saya berbicara dengan salah satu anggota PPK Kecamatan Wori. Anggota PPK bernama Yongki Dien, itu menyebutkan bahwa mereka menandatangani Formulir DAA-1 itu pada awal bulan ini, yaitu hari Kamis di minggu kedua. Sementara Formulir DAA-1 yang kami ketahui, harusnya dibuat dan ditandatangani pada saat pleno rekapitulasi di kecamatan.

Itu ada videonya kami wawancarai dan kami memberikan sebagai bukti.

401. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Divideokan, ya?

402. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI DOCHMIE

Ya, divideokan. Sudah disampaikan ke hakim.

403. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terkait rekap.

404. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI DOCHMIE

Rekapnya?

405. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

406. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI DOCHMIE

Jadi terjadi kejanggalan kekos ... apa namanya ... dalam permohonan itu, setelah dilakukan persandingan data C-1, DAA-1, dan DA-1, itu DAA-1 itu kosong. Sehingga dari C-1 lompat ke DA-1. Sehingga DA-1 itu berisi jumlah suara per TPS per desa. Sehingga di DA-1 itu tinggal jua ... jumlah suara per desa saja, per TPS-nya sudah hilang. Dalam permohonan kami, itu dalam 7 desa saja kami mendapatkan selisih 43 suara, dalam permohonan itu. tetapi lebih aneh lagi, kami mendapatkan jawaban atas keterangan dari Bawaslu, dari 7 desa tersebut, yang selisih kami 43, malah Bawaslu menemukan selisih 1.229 dalam 7 desa tersebut.

407. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nanti mohon dicatat oleh Bawaslu itu, ya! Benar enggak pernyataan itu.

408. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI DOCHMIE

1.229 selisihnya, itu penambahan suara PDIP (...)

409. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Maaf, maaf. Tadi Bapak menemukan kalau Bapak sendiri catatannya berapa?

410. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI DOCHMIE

43.

411. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

43. Tapi dari Bawaslu mengatakan?

412. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI DOCHMIE

7 desa yang sama.

413. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Di 7 desa yang sama Bawaslu mengatakan berapa?

414. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI DOCHMIE

Bawaslu 1.229 pertambahan suara PDIP.

415. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nanti mohon tanggapan (...)

416. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI DOCHMIE

Ada dalam satu desa itu suara PDIP bertambah sampai 490 lebih. Nah, itu lah, Pak Hakim, yang kami meminta dari sejak pleno di kabupaten itu untuk dilakukan persandingan kembali dan kalau sebisanya dilakukan perhitungan kembali surat suara dalam kotak suara sepanjang 3 kecamatan tersebut di tingkatan DPRD Kabupaten. Karena kami sangat mencurigai C-1 yang tercoret-coret tanpa keterangan, tanpa berita acara. C-1 tidak sesuai angka-angkanya. Ada yang terisi, ada yang tidak terisi dan itu sudah kami sampaikan.

Kami memiliki C-1 asli dari kami, kami memiliki C-1 dari Bawaslu yang kami minta, dan kami memiliki C-1 dari PDIP. Lengkap 3 kecamatan.

417. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik, ya. Cukup?

418. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI DOCHMIE

Ada tambahan juga. Yang soal terkait ... apa ... laporan dana kampanye Partai Hanura. Itu saya berada di ruang pleno, semua partai ada di situ. KPU waktu itu mengumumkan bahwa batas waktu pemasukan laporan dana kampanye itu tanggal 1 (...)

419. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebentar-sebentar. Ini apa konteksnya dengan perolehan suara?

420. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI DOCHMIE

Karena ada di permohonan saja, Pak Hakim.

421. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya sudah, ndak usah diterangkan. Itu kan ndak ada kaitannya dengan ini. Itu ... itu (...)

422. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI DOCHMIE

Ya. Enggak, saya menyaksikan siapa saja yang memasukkan itu. Karena itu diserahkan pada saat di ruang pleno, Pak Hakim.

423. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ndak, maksudnya itu kan itu ndak ada konteksnya dengan ... kalaupun misalnya itu benar terjadi, atau tidak ini ... itu kan ... Saudara juga tidak tahu kan, apa pengaruhnya terhadap suara, kan?

424. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI DOCHMIE

Siap.

425. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu, jadi itu yang saya maksud tidak ada konteksnya.

426. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI DOCHMIE

Maksudnya, Pak Hakim, minta ... mohon izin. Gimana?

427. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bagaimana?

428. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI DOCHMIE

Maksud, Pak Hakim tadi gimana?

429. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ndak. Kalau Saudara kan mau kaitkan soal dana kampanye (...)

430. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI DOCHMIE

Oh, memengaruhi ... memengaruhi, Pak.

431. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bagaimana caranya Saudara tahu mempengaruhi, itu?

432. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI DOCHMIE

Apa ... karena ... bagaimana?

433. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ndak. Jangan nanya ke sana.

434. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI DOCHMIE

Karena (...)

435. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Eh Saudara Lawyer saya ingatkan, jangan bisik-bisik. Saya mau mendengarkan keterangan suara asli dari ... dari Saksi.

436. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI DOCHMIE

Izin ... izin, Pak Hakim. Makanya saya ingin menjelaskan secara keseluruhan yang saya tahu.

437. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bukan ... bukan ... saya mau singkat saja. Apa konteksnya Saudara mau menya ... me ... me ... memberikan keterangan soal dana kampanye itu dengan perolehan suara?

438. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI DOCHMIE

Karena partai kami, saya sebagai ini ... berkepentingan

439. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bukan soal berkepentingan, konteksnya berapa? Bisa Saudara mengatakan misalnya sebagai akibat dari dana kampanye ini, suara kami hilang sekian.

440. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI DOCHMIE

Oh, bukan.

441. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, kalau sudah itu, ndak usah. Itu sudah di luar konteks.

442. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI DOCHMIE

Saya ingin menambahkan yang lain saja, yang tadi, Pak Hakim.

443. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang apa? Ada kaitannya dengan suara?

444. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI DOCHMIE

Ya. Suara.

445. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu saja. Jangan kemana-mana.

446. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI DOCHMIE

Di ... apa ... laporan kami ke Bawaslu kabupaten, memang kami lebih cenderung itu kepada suara Partai Gerindra. Yang itu sudah ada putusannya tadi yang dibacakan.

447. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Maksudnya Saudara bagaimana itu?

448. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI DOCHMIE

Ini ada, ada putusan, putusan apa, putusan Bawaslu. Yang semua dalam putusan ... dalam persidangan ini (...)

449. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saudara lawyer, untuk perkara ini, itu di Bukti berapa? Kuasa Hukum? P-34? Ini, ini Bukti P-34 ini, ini adalah putusan dari Bawaslu. Ini kan tidak ada soal apa, ini nya aja tidak memerintahkan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang, tetapi itu hanya (...)

450. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pelanggaran administratif.

451. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pelanggaran administratif. Itu kan Buktinya itu?

452. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI DOCHMIE

Saya mau menjelaskan itu, Pak Hakim. Bahwa dari anggota Bawaslu menyampaikan kepada kami secara lisan (...)

453. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jangan, jangan, jangan yang lisan-lisan. Ini, Saudara mau merujuk Bukti ini tadi kan?

454. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI DOCHMIE

Ya, mereka tidak bisa memutuskan karena ini perkara administrasi. Mereka hanya bisa menangani perkara administrasi.

455. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu sudah jelas karena sesuai dengan (...)

456. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI DOCHMIE

Perkara untuk memutuskan, mengembalikan proses ataupun menetapkan jumlah suara itu kewenangan MK Mahkamah.

457. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sudah, sudah, sudah cukup nih (...)

458. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, saya kira cukup, ya?

459. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRI DOCHMIE

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr.wb.

460. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ke Pemohon silakan kalau ada yang ... satu pertanyaan, Pak Kadir.

461. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERMAN KADIR

Saudara Saksi Muzaqirboven, ya? Ketika rekapitulasi di provinsi, apakah Saudara manandatangananinya?

462. SAKSI PEMOHON: MUZAQIR BOVEN

Saya tidak (...)

463. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pake mik sebelahnya, Pak, supaya (...)

464. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, itu miknya, ya. Ya, hanya 1 ke ... Pak Herman Kadir?

465. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERMAN KADIR

Ya, hanya satu (...)

466. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Hanya ke ... ke Pak Fahri Dohmi saja, ya?

467. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERMAN KADIR

Ya, ya.

468. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, silakan!

469. SAKSI PEMOHON: MUZAQIR BOVEN

Saya sebagai saksi pada rekapitulasi KPUD tingkat provinsi dari Partai Amanat Nasional tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tersebut. Ya, berita acara saya, ada saya bikin.

470. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, terima kasih, Pak Herman Kadir. Saya kira cukup, Pak Muzaqir, ya? Kita ke Termohon, KPU, siapa yang akan, apa ... kalau di sini namanya ada 3 kan ya, tadi ya?

471. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRIYANTO

Ya, Yang Mulia.

472. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ardilles Mewoh, kemudian Dikson Lahope, dan Lanny Ointu?

473. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRIYANTO

Betul, Yang Mulia. Kemudian, mohon izin, Yang Mulia, sebelum ditanggapi tentunya dengan seizin Yang Mulia kami hendak memberikan bukti tambahan.

474. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, bukan dari tadi ngomong, tolong petugas ambil (...)

475. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRIYANTO

Kami belum diberi kesempatan tadi, Yang Mulia. Oh ya, baik, Yang Mulia.

476. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

477. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dari Pemohon sudah ndak ada kan? Pihak Terkait tidak ada tambahan, ya? tidak, ya? Sudah lengkap?

478. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVI/2019:

Tidak ada, Yang Mulia.

479. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih.

480. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Silakan!

481. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRIYANTO

Ya, ya, mohon izin, Yang Mulia. Untuk KPU ... untuk menanggapi terkait gugatan yang untuk DPR RI ada Bapak Ketua Provinsi yang akan

menanggapi. Kemudian yang dari, apa ... Minahasa Utara III itu ada Bapak Charles. Demikian, Yang Mulia.

482. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, sekarang yang Pak Ardilles, ya? Ya, silakan!

483. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVI/2019: ARDILLES M.R. MEWOH

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, mohon izin untuk memberikan keterangan terkait dengan proses rekapitulasi perolehan suara di Pleno tingkat provinsi.

Untuk Pleno di tingkat provinsi, KPU Sulawesi Utara melaksanakan Pleno sejak tanggal 6 bulan Mei tahun 2019 dan berakhir di tanggal 12 bulan Mei tahun 2019. Dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan seluruh saksi partai politik di tingkat provinsi yang dimandatkan. Dalam pelaksanaan Pleno ini, untuk di bagian awal kami menjelaskan terkait dengan mekanisme Pleno sebagaimana ketentuan dalam Peraturan KPU bahwa dalam setiap kabupaten/kota akan membacakan sertifikat hasil rekapitulasi, kemudian kami berikan kesempatan untuk keberatan terhadap setiap saksi.

Nah, sejak kabupaten yang pertama membacakan hasil rekapitulasi sampai dengan kabupaten yang terakhir, itu kami selalu memberikan kesempatan kepada saksi untuk mengajukan keberatan apabila ada keberatan dari setiap saksi dan ini berjalan sesuai dengan yang kami sampaikan di bagian awal. Terkait dengan keterangan dari Saksi Pemohon tadi, khususnya yang ingin kami langsung tanggap saja, saya terkait keterangan saksi Pemohon bahwa ada penambahan suara di Kabupaten Minahasa Utara. Ada 7 kecamatan yang secara keseluruhan disebutkan di sini ada 276 bertambah untuk Pihak Terkait Partai Nasdem. Terhadap keterangan saksi ini perlu kami sampaikan bahwa itu tidak pernah disampaikan dalam setiap keberatan saksi yang kami berikan kesempatan pada pleno di tingkat provinsi.

Nah itu yang akan kami sampaikan karena, dalam setiap pengajuan keberatan termasuk Saksi ini kita berikan kesempatan. Termasuk apabila tentu terkait hasil perolehan suara ini kalau memang demikian itu akan kita tindak lanjuti dengan melakukan atau menanyakan kepada KPU Kabupaten khususnya Minahasa Utara untuk menjelaskan sebagaimana tindak lanjut. Sejauh mana tindak lanjut dari KPU Minahasa Utara, nah itu yang pertama.

Yang kedua, tadi juga Saksi Pemohon menyebutkan bahwa beliau mengajukan Formulir Model DC-2 yaitu Formulir keberatan Saksi atau catatan kejadian khusus. Apabila KPU tidak menindaklanjuti atau apabila partai politik Saksinya masih keberatan terhadap apa yang disampaikan

dalam pleno. Dan dalam Formulir Model DC-2 yang disampaikan oleh Saksi Pemohon itu sama sekali tidak menyebutkan keberatan terkait dengan perselisihan hasil perolehan suara.

Sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Pemohon.

484. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Isinya apa itu?

485. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVI/2019: ARDILLES M.R. MEWOH

Disini ada 2, Yang Mulia.

Yang pertama, Saksi Pemohon ini menyatakan menolak terkait dengan apapun keputusan Pleno KPUD Provinsi. Kemudian, yang kedua Pemohon menyatakan terjadi perubahan angka namun terhadap DPT, DPTb, dan DPK. Ini adalah terkait dengan data pemilih, yang memang dalam setiap forum dalam setiap pleno rekapitulasi kami melakukan pembetulan jika ada kekeliruan terkait penulisan angka-angka dalam daftar pemilih.

486. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi, bukan selisih hasil?

487. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVI/2019: ARDILLES M.R. MEWOH

Bukan selisih hasil, Yang Mulia.

488. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Maaf, Saudara Kuasa itu dilampirkan sebagai bukti tidak?

489. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRIYANTO

T-002, Yang Mulia.

490. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

T-002?

491. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRIYANTO

Betul, Yang Mulia.

492. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke. T-002.

493. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVI/2019: ARDILLES M.R. MEWOH

Saya tidak perlu membacakan secara keseluruhan, Yang Mulia.

494. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

495. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVI/2019: ARDILLES M.R. MEWOH

Kemudian, yang terakhir yang ingin saya sampaikan Majelis Hakim, Yang Mulia. Terkait dengan pleno di tingkat kabupaten karena dalam pleno di tingkat provinsi. KPU provinsi memberikan kesempatan kepada setiap kabupaten untuk membacakan sertifikat hasil perhitungan perolehan suara.

Nah, setelah membacakan sertifikat hasil perhitungan perolehan suara, KPU provinsi memberi kesempatan atau menanyakan kepada setiap kabupaten kota di wilayah KPU provinsi untuk menyampaikan jika ada keberatan Saksi di pleno tingkat kabupaten. Terkait dengan pemilihan anggota DPRD Provinsi, pemilihan anggota di DPD, pemilihan anggota DPR RI, dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Nah dari 15 kabupaten kota yang membacakan sertifikasi hasil perhitungan perolehan suara dan juga membacakan Formulir Model DB-2 atau keberatan Saksi atau kejadian khusus, tidak ada penyampaian terkait dengan sebagaimana tuduhan dari Pemohon. Ada penambahan suara untuk partai Nasdem dan ada pengurangan suara untuk partai Amanat Nasional.

Setelah kami memeriksa Formulir Model DB-2 ... mohon maaf, Formulir Model DB-1 yaitu sertifikasi hasil perhitungan perolehan suara disetiap kabupaten kota diseluruh Provinsi Sulawesi Utara, Saksi Pemohon di 15 kabupaten kota juga semua bertanda tangan dalam Formulir Model DB-1. DPR khususnya.

Saya kira itu saja, demikian, Yang Mulia Majelis, terima kasih.

496. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih.

Selanjutnya, siapa Dikson atau Charles?

497. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVI/2019: CHARLES YOHANES

Charles, Yang Mulia.

498. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, silakan!

499. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVI/2019: CHARLES YOHANES

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, Salam sejahterah untuk kita semua.

Sebelum saya menanggapi keterangan dari Pemohon, izinkan, Yang Mulia. saya ingin menyampaikan bahwa permohonan Pemohon itu tidak mempengaruhi hasil kursi ... hasil perolehan kursi. Dimana dalam dapil Minahasa Utara 3 itu diperebutkan 8 kursi, PAN itu di urutan ke 9. Sebenarnya perolehan PAN itu 2.142 harus Pihak Terkaitnya Gerindra dikursi ke-8. Kalau PDIP itu=10.710.

500. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pak, itu sudah urusan pertimbangan Hakim. Nanti Bapak tidak usah mencampuri itu, ya?

501. SAKSI TERMOHON: CHARLES YOHANES

Oke saya ingin menanggapi keterangan dari Saksi Pemohon. Pertama terkait dengan keterangan Muzaqir Boven. Bahwa tadi dikatakan bahwa menghilangkan suara partai direkapitulasi kecamatan. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa permohonan Pemohon tidak mencantumkan atau menuntut bahwa ada kehilangan surat suara. Akan tetapi menuntut perolehan suara mereka tetap yaitu=2.142. sehingga, tadi saya bingung kenapa dikatakan kehilangan surat suara. Dalam rekapitulasi tingkat kecamatan memang ada terjadi perubahan. Itu diakibatkan ada keberatan saksi yang datang mereka dengan data yang disampaikan oleh PPK itu berbeda. Sehingga, dibuka kotak untuk diambil C1.Plano. Lalu, dibacakan C1.Plano sebagai acuan. Sehingga, dibacakan, disalin dalam DAA-1 sesuai atau merujuk dalam Peraturan Nomor 4, itu telah selesai dilaksanakan. Semua saksi menerima semua hasil yang telah dikoreksi. Dikoreksi, lalu dituangkan dalam DA-1 dan tidak ada keberatan di Likupang Barat, Kecamatan Likupang Timur. Bahkan di Likupang Timur itu sertifikatnya DB-1 itu ditandatangani oleh Saksi Pemohon, Partai PAN. Dan di Kecamatan Wori.

Jadi, tidak ada persoalan, tidak ada keberatan, tidak ada Formulir DA-2 yang disampaikan oleh saksi panwascam atau saksi Pemohon. Baru terkait dengan Putusan Bawaslu. Yang dipersoalkan dalam Sidang Ajudikasi Bawaslu bukan cuma terkait dengan persoalan tidak diserahkan DAA-1. Akan tetapi ada dugaan penggelembungan suara, ada dugaan pemilih yang bukan DPT memilih. Akan tetapi, tidak terbukti dalam Sidang Ajudikasi Bawaslu.

DA-1 itu bukan tidak diberikan, Yang Mulia. Akan tetapi, dimintakan oleh PPK bagi siapa yang ingin mengambil DA-1 partai-partai, silakan untuk ambil. Tapi, kebanyakan ada yang mengambil ... Tapi kebanyakan tidak mau mengambil karena ingin ambil saja DA-1. Karena hasil DA-1 itu kan katanya hasil terakhir di rekapitulasi tingkatan kecamatan, sehingga DAA-1 banyak yang tidak ambil. Bukan tidak diserahkan oleh PPK tapi tidak diambil oleh Para Saksi.

502. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Masih ada?

503. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVI/2019: CHARLES YOHANES

Oke. Masih ada lagi, Yang Mulia.

Terkait dengan adanya 1.229. di dalam rekapitulasi tingkatan kecamatan tidak ada keberatan terkait dengan poin-poin tersebut yang disampaikan oleh Saudara Saksi (...)

504. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Suara PDIP, ya? 1.229 itu?

505. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVI/2019: CHARLES YOHANES

Ya.

506. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

507. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVI/2019: CHARLES YOHANES

Tidak pernah disampaikan. Didalam rekapitulasi tingkatan kabupaten juga tidak disampaikan adanya keberatan penggelembungan penambahan atau kehilangan surat suara. Yang ada di DB-2 yang

disampaikan oleh saksi Pemohon atas nama Fahri Domi yang hadir pada saat rekapitulasi tingkatan kabupaten, itu kotak suara yang tidak tersegel untuk Kecamatan Likupang Termohon ... Likupang Timur. C-1 tercoret-coret tanpa berita acara. Desa Gangga 1 terdapat ada pemilih yang terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih dan ada penggelembungan suara pada beberapa TPS di Dapil III, yang tidak menyebutkan di TPS-TPS mana dan waktu rekapitulasi tingkatan kabupaten itu telah disandingkan data dengan data Bawaslu. Pada waktu itu dengan data juga saksi Pemohon untuk disandingkan, cocok enggak? Cocok untuk data DA-1.

Jadi, sudah Yang Mulia. Sudah disandingkan data-data tersebut dan DB-2 yang dimintakan oleh Saksi Pemohon itu telah terjawab.

508. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

509. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVI/2019: CHARLES YOHANES

Diberikan kesempatan kepada PPK untuk menjelaskan kejadian-kejadian di kecamatan.

510. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya saya kira (...)

511. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVI/2019: CHARLES YOHANES

Oke.

512. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pokok-pokoknya sudah.

513. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVI/2019: CHARLES YOHANES

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

514. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sudah cukup, ya? Ya.
Selanjutnya, Ibu Lany, ya?

515. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVI/2019: LANNY A. OINTU

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ini saya ingin menambahkan bahwa ... karena tadi sudah banyak dijelaskan oleh Ketua kami. Karena saya kebetulan Korwil di Minut. Jadi, proses rekapitulasi di Kabupaten Minut itu berjalan sesuai rencana.

516. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Saudara Ketua Divisi Perencanaan?

517. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVI/2019: LANNY A. OINTU

Ya.

518. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

519. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVI/2019: LANNY A. OINTU

Perencanaan data, Pak Yang Mulia. Mungkin yang hanya ingin saya tambahkan saja bahwa kenapa DAA yang tadi tidak diberikan. Namun, pada tingkat rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota kebetulan kami turun karena melakukan monitoring secara langsung, dibandingkan dengan DA-1 dari Bawaslu. Begitu juga dengan Saksi dari partai yang lain.

Jadi, tidak ditemukan perbedaan ketika proses penyandingan itu terjadi. Sehingga, tidak ada rekomendasi apapun tertulis dari Bawaslu. Jadi, Pleno kami tetap Pleno Kabupaten/Kota tetap berjalan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada. Mungkn itu saja, Yang Mulia.

520. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Cukup. Pihak Terkaitnya tidak?

Dari Bawaslu dulu, ya! Baik dari ... mungkin lebih dulu dari kabupatennya, ya? Yang Minahasa DPRD Kabupaten.

521. BAWASLU SULAWESI UTARA: SUPRIYADI PANGELLU

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kami serahkan kepada Bawaslu Minahasa Utara. Secara garis besar kami menegaskan hasil pengawasan Bawaslu secara berjenjang dalam proses rekapitulasi penghitungan suara baik dari tingkat kecamatan bahkan kabupaten/kota, tidak ada penambahan suara oleh Termohon terhadap Partai nasdem. Demikian juga tidak adapengurangan suara Pemohon terhadap ... yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon. Namun, hanya ada di Kabupaten Sitaro seperti yang sudah kami sampaikan dalam keterangan tertulis. Bahwa ada salah pencatatan dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan. 16 suara yang sepatutnya menjadi suara Caleg Partai PAN salah input di Partai PSI. Sudah kami sampaikan dalam keterangan pada saat pemberian keterangan minggu kemarin.

Terkait dengan Putusan Bawaslu Minaha Utara. Saya izin, Yang Mulia, kami persilakan anggota Bawaslu Minahasa Utara, Bapak Rocky Marciano Ambar untuk memberikan penjelasan secara singkat, padat, dan jelas.

522. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pak siapa, Pak?

523. BAWASLU MINAHASA UTARA: ROCKY MARCIANO AMBAR

Rocky Marciano Ambar, Yang Mulia.

524. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ah, ini pasti penggemar tinju ini kayanya Bapak.

525. BAWASLU MINAHASA UTARA: ROCKY MARCIANO AMBAR

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Izin untuk dapat memberikan keterangan sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi dan Pemohon. Terkait dengan Putusan Nomor 003/PL/ADM/BWSL.Kab/25.12/V/2019. Benar bahwa memang Pemohon mengajukan Permohonan pelanggaran administrasi pemilu di Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara dan terkait dengan Permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara telah memutuskan bahwa menyatakan PPK Wori, PPK Likupang Timur, dan PPK Likupang Barat secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara prosedur atau mekanisme dimana tidak menyerahkan DAA-1 KPU kepada saksi peserta pemilu.

Hal ini disampaikan bahwa sebagaimana dalam PKPU IV/2019 bahwa penyerahan DAA-1 itu, itu merupakan sifatnya wajib, jadi diserahkan. Tetapi di fakta persidangan, adjudikasi melalui keterangan saksi bahwa PPK itu menawarkan ... menanyakan kepada beberapa saksi apakah ini bis ... mau ambil atau tidak? Jadi setelah saksi menyatakan tidak diambil, dengan demikian DAA-1 tidak diserahkan. Tetapi kembali pada rujukan PKPU IV/2019, PPK wajib menyerahkan. Dalam pandangan tersebut, Majelis berpandangan bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh PPK.

Kedua, terkait dengan mekanisme sebagaimana yang dinyatakan bersalah tadi Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara meminta kepada KPU Kabupaten Minahasa Utara untuk memberikan teguran tertulis kepada PPK, sebagaimana juga dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara atas putusan yang dikeluarkan dalam waktu 3 hari KPU Kabupaten Minahasa Utara sudah langsung melakukan tindak lanjut. Jadi, berdasarkan pengawasan kepada pelaksana putusan, KPU Kabupaten Minahasa Utara sudah melaksanakan putusan itu dengan memberikan surat teguran kepada PPK yang berada di 3 kecamatan itu, Yang Mulia.

526. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik.

527. BAWASLU SULAWESI: ROCKY AMBAR

Selanjutnya, Yang Mulia terkait dengan adanya yang penggelembungan suara yang disampaikan Pemohon tadi ada 1.229. Dalam pengawasan aktif dan sampai juga rekapitulasi, Bawaslu tidak mendapatkan adanya penggelembungan suara yang berjumlah 1.229 suara. Itu saja.

528. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Lapo ... laporan itu kalau Saudara ada, ndak?

529. BAWASLU MINAHASA UTARA: ROCKY MARCIANO AMBAR

Tidak ada laporan.

530. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Temuan?

531. BAWASLU MINAHASA UTARA: ROCKY MARCIANO AMBAR

Tidak ada temuan. Terima kasih, Yang Mulia.

532. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Selanjutnya ada yang ditambahkan dari Bawaslu Sulawesi Utara?

533. BAWASLU SILAWESI UTARA: SUPRIYADI PANGELLU

Cukup, Yang Mulia.

534. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Cukup? Baik. Lanjut dari Pihak Terkait dari Nasdem, Saudara Moktar Arunde Parapaga, ya? Ya, silakan!

535. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVI/2019: MOKTAR ARUNDE PARAPAGA

Siap, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. salam sejahtera bagi kita sekalian. Dapat saya sampaikan situasi karena saat itu saya sebagai saksi dari Partai Nasdem, dalam posisi saya sebagai Ketua Badan Pertimbangan Pemilu Kemenangan.

536. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Saksi di rapat rekap di provinsi?

537. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVI/2019: MOKTAR ARUNDE PARAPAGA

Provinsi. Bertempat di Hotel Peninsula.

538. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

539. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVI/2019: MOKTAR ARUNDE PARAPAGA

Meja kami posisi kedua di depannya Golkar dan PDIP, PAN di belakang saya ... di belakang kami, posisi meja saat itu.

540. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

541. SAKSI PIHAK TERKAIT: MOKTAR ARUNDE PARAPAGA

Kami diberikan kesempatan oleh KPU pada saat setelah pembukan pleno KPU, mendengarkan masing-masing KPUD provinsi ... eh, kabupaten/kota untuk menyampaikan hasil pleno masing-masing sertifikat itu dan diberikan kesempatan jika ada yang keberatan. Rata-rata (...)

542. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pak, kalau yang sudah diterangkan oleh Ketua KPU, kecuali ada yang berbeda itu enggak usah diulang lagi.

543. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVI/2019: MOKTAR ARUNDE PARAPAGA

Oke.

544. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tadi kan sudah disampaikan kalau itu mekanismenya.

545. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVI/2019: MOKTAR ARUNDE PARAPAGA

Siap. Ya.

546. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ada tambahan ndak dari yang itu?

547. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVI/2019: MOKTAR ARUNDE PARAPAGA

Tambahannya adalah yang terjadi pada waktu itu hanya banyak pada soal perbedaan DPT dan DPTb, hanya itu. Keberatan lain-lain tidak ada.

548. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Selisih suara tidak ada?

549. SAKSI PIHAK TERKAIT: MOKTAR ARUNDE PARAPAGA

Tidak ada. Pak Boven itu nanti hari kedua, saya lihat hadir. Eh, hari ketiga kalau tidak salah. Saya hadir dari hari pertama sampai selesai. Terima kasih, Pak Hakim.

550. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, sudah cukup, ya? Baik. Kami kembalikan ke Pak Ketua.

551. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Begitu kalau memberikan keterangan, kalau yang sudah tidak usah lagi. Apa lagi nanti? Bahasa Manadonya apa, Pak? Tidak usah lagi ngana ulang itu begitu, kan? Begitu, ya? Nah, itu ndak perlu lagi. Jadi, tidak perlu.

Ini untuk Pihak Terkait ... terkait ... berkaitan dengan bukti itu loh, ya sebelum saya mengumumkan ini. Ini dari Pihak Terkait PDIP, itu menyerahkan bukti, sebenarnya yang ada pada kami itu menyerahkan Bukti PT-1 sampai dengan PT-18 betul, ya? Betul?

Tapi an ... ini ... jadi bukti P-1-nya itu ikut diserahkan kan? Karena sempat disangkal itu, Anda mengatakan tidak ... tidak sempat menyerahkan itu, padahal ada di tempat kami.

552. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JELLIJ DONDOKAMBEY

Sudah diserahkan, Yang Mulia.

553. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Berarti ini sudah diserahkan, enggak ada masalah lagi.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Termohon itu tadi yang diserahkan adalah setelah diperiksa oleh TPP di belakang dan staf lainnya. Itu T-024 Minahasa Utara 3 PAN dan seterusnya, sampai T-025. Betul?

554. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRIYANTO

Betul, Yang Mulia.

555. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, tidak ada masalah.

KETUK PALU 1X

Dengan demikian, maka untuk perkara ini sudah ... kita sudah sudah, selesai. Nanti kami sampaikan kepada Pemohon ... Pihak Termohon, Pihak Terkait dan Pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkara ini. Tinggal Saudara-saudara semua menunggu panggilan sidang dari Mahkamah Konstitusi yang akan menyampaikan tentang putusan akhir ... putusan mengenai perkara ini, yang nanti akan disampaikan lewat surat panggilan itu. Dan putusan akan diucapkan bersama-sama dengan perkara yang lainnya setelah pemeriksaan pembuktian selesai dan setelah kami selesai melaksanakan rapat permusyawaratan Hakim.

Demikian. Dengan demikian sidang sudah selesai dan saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.33 WIB

Jakarta, 24 Juli 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.